



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERU TRI WIDARTO
2. Jabatan : SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
3. NHK : 230522

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.703.160.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/52 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 669.510.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/102 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.033.650.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 341.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, NISSAN LIVINA VL 1.5 (4X2) A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. MOBIL, NISSAN MAGNITE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 177.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 258.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 2.027.767.285

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.902.627.862

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.233.355.147

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.233.355.147

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.